

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah mempelajari permasalahan yang dihadapi dan juga solusi pemecahan yang diusulkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Komputerisasi pada rancangan Sistem Informasi Pengelolaan data barang inventaris yang terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi kerja dan memudahkan Bidang Kepegawaian dalam mengawasi dan pemberian sanksi pelanggaran kedisiplinan PNS pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Sistem yang dibangun dapat menghasilkan kecepatan, ketepatan dan keakuratan dan dapat meminimalisir kesalahan dalam Mekanisme Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Ringan PNS Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga menghasilkan informasi yang tepat sebagai dasar pengambilan keputusan untuk proses selanjutnya.
- c. Perancangan sistem informasi yang berorientasi objek (*Object Oriented*) dapat menghasilkan sebuah sistem informasi yang lebih baik dan lebih mudah dipahami oleh *user* dalam hal struktur perancangannya dan implementasinya.

5.2 Saran

Adapun saran–saran yang perlu dikemukakan adalah sebagai berikut :

- a. Perlu adanya pelatihan kepada *user* yang akan menggunakan sistem informasi pengelolaan data barang inventaris ini, supaya mereka mengetahui bagaimana cara menggunakan sistem juga dalam perawatan aplikasi ini.
- b. Untuk menghindari berbagai kesalahan yang mungkin timbul pada sistem, perlu dilakukan perawatan (*maintenance*) secara rutin. Pengontrolan akses pengguna (*user*) juga perlu diperhatikan yang merupakan salah satu cara perawatan yang terbaik untuk menghindari berbagai kesalahan dalam penggunaan sistem.
- c. Secara rutin perlu dilakukan dalam memback-up data yang ada untuk menghindari kerusakan data atau kehilangan data yang merupakan salah satu dalam penyelamatan data barang inventaris.
- d. Spesifikasi Komputer (*hardware* dan *software*) perlu diperhatikan dalam implementasi sistem yang akan digunakan oleh Bidang Kepegawaian dalam Mekanisme Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Ringan PNS Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar sistem dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- e. Perlu adanya audit sistem paling tidak setiap 3 tahun sekali pada sistem informasi pengelolaan data barang inventaris ini agar dapat memperbaiki kesalahan – kesalahan yang terjadi pada sistem sehingga sistem yang ada dapat ditingkatkan lebih baik dan lebih bermanfaat bagi *user*.